



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT  
PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH/DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa sesuai usul dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan, yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- a. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. Memiliki integritas;
    2. Memiliki disiplin tinggi;
    3. Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
    4. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
    5. Menandatangani Pakta Integritas;
    6. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
    7. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
  - b. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka PA/KPA bertindak sebagai PPK.
- KELIMA : Masa tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 4 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
h. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG  
 MENANDATANGANI SPM DAN SPJ PADA OPD/DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI  
 KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	OPD	PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rahmad Labou, S.STP Nip. 19780410 199810 1 001 Pembina, IV/a (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Armiaty Hanggi, S.Ag Nip. 19700524 201411 2 001 Penata Muda, III/a	Rahmad Labou, S.STP Nip. 19780410 199810 1 001 Pembina, IV/a (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	6	7

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*

  
 RAIS D. ADAM